

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bahrudin Surjobroto, 1991, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
- Nasrhriana. 2012. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit,
- Roeslan Saleh, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, Aksara Baru, Jakarta.
- Satya Arianto, 2008, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Soerjono Soekanto, 2004, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- Sudarto, 1981, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta, Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan ATAS Peraturan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata  
Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017  
tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi tahanan, anak dan  
narapidana.

## **C. Sumber-sumber lain/Jurnal/Internet**

Andre Gustiranda Manullang, Rolando Marpaung, 2021, Perlindungan  
Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga  
Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan, Jurnal  
TELEKESNOS Vol 3, Nomor 1

Angreini Kresnadari, 2018, *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan  
Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Dalam Keadaan Hamil  
(Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB  
Yogyakarta)*, Vol. 6 Nomor 2

Anshar, Syawal Abdulajid, 2021 Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, Jurnal Jurisprudentie Vol 8, Nomor 1

Pitri Wili Ramadani, 2017, *Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Vol. 4 Nomor 2

<https://www.antaranes.com>

